

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak peristiwa reformasi demokrasi di Indonesia, pembicaraan mengenai hidup bersama tidak lagi didominasi oleh wacana propaganda negara, demokrasi kembali lagi ke marwah sebenarnya. Setiap orang berhak untuk berbicara dan mengajukan usul mengenai bagaimana hidup bersama harus diatur. Mengingat yang terlibat dalam pembicaraan tersebut mempunyai latar belakang dan pengalaman yang berbeda, maka tentu subjektivitas relatif terbuka. Runtuhnya Orde Baru pada 1998 yang dikenal dengan reformasi, memberikan angin segar bagi munculnya ruang partisipasi masyarakat. Tapi, harapan itu sepertinya akan terkubur, karena yang terjadi justru kebebasan politik dijadikan sarana pertarungan para elit dalam meraih kekuasaan (Muthhar, 2020).

Fakta bahwa berbagai suku bangsa hidup berdampingan di Indonesia, masing-masing dengan adat istiadat dan budaya yang mereka miliki, menciptakan sebuah bentuk keunikan dan subjektivitas yang khas. Dalam diskusi mengenai kehidupan bersama, keberagaman, yang kerap disebut sebagai keadaan multikultural, memegang peran yang sangat penting. Keberagaman ini bukan hanya menjadi kekayaan budaya, tetapi juga sumber kekuatan dalam menciptakan hubungan harmonis di tengah perbedaan. Keberagaman yang ada mengajarkan kita untuk saling menghargai dan memahami, serta memperkaya pengalaman hidup

bersama dalam masyarakat yang inklusif. Dengan adanya saling pengertian antarbudaya, kita dapat membangun sebuah bangsa yang lebih kuat, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan global (Talibo, 2023).

Indonesia yang merupakan bangsa timur, memiliki budaya gotong royong yang menjadi bukti bahwa semangat kebersamaan sudah menjadi darah-daging bangsa Indonesia. Sejak masa kecil, kita telah dikenalkan dengan konsep "jati diri bangsa", yang mencerminkan perilaku dan sikap sebagai bagian dari identitas personalitas yang membedakan Indonesia dari negara lain. Konsep jati diri ini telah tertanam sejak masa sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan tercermin dalam pendidikan kewarganegaraan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pokok identitas tersebut (Adha, 2021).

Berbagai aspek kehidupan seperti, subjektivitas, polaritas, multikultural, keunikan dari setiap sisi kehidupan bangsa menjadi satu dalam sebuah ruang publik. Pada ruang publik inilah, individu dari berbagai macam kelompok masyarakat berkumpul dalam rangka membicarakan dan memperjuangkan segala hal yang menyangkut kepentingan mereka bersama. Oleh karena itu, kehidupan bersama masyarakat dalam sebuah payung demokrasi sangat ditentukan oleh apa yang terjadi dalam sebuah ruang publik. Melihat sejarah kepemimpinan kita, sangat jarang ditemukan seorang pemimpin di negara ini memanfaatkan ruang publik (demokrasi) sebagai ruang bersama untuk berdialog bersama-sama menyampaikan dan mendengarkan aspirasi masing-masing guna mencapai tujuan bersama. Hampir sebagian pemimpin di negara ini lebih mengedepankan aspirasi otoritas mereka untuk menentukan sebuah kebijakan tanpa mengindahkan suara rakyat (publik).

Artinya apa yang diputuskan oleh pemerintah menjadi sebuah keputusan absolut yang harus diterima oleh rakyat. (Azizah, 2023).

Suatu negara dengan keberagaman budaya seperti Indonesia memiliki kemungkinan terjadinya konflik yang signifikan. Konflik ini timbul akibat perbedaan dalam cara hidup dan identitas dari berbagai kelompok. Perbedaan tersebut bisa menimbulkan prasangka antar etnis yang berpotensi memicu terjadinya bentrokan antar kelompok. Selain itu, ketidakpahaman dan stereotip yang berkembang di masyarakat juga dapat memperburuk situasi, sehingga memperbesar risiko perpecahan sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus memperkuat rasa saling menghormati dan memahami keberagaman agar tercipta keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk (Thahir, 2023).

Ruang publik memiliki peran sentral dalam kehidupan demokratis. Di ruang inilah masyarakat dapat saling berinteraksi, berdiskusi, dan mengekspresikan pandangan serta kepentingannya secara terbuka dan setara. Namun, dalam masyarakat modern yang saat ini dipenuhi oleh komersialisasi, dominasi negara, serta arus informasi yang dikendalikan oleh media arus utama, ruang publik semakin kehilangan sifat aslinya yaitu tempat bagi diskursus kritis yang bebas dan rasional.

Ruang publik menjadi salah satu cara untuk melakukan prinsip demokrasi yaitu berkumpul, berserikat dan menyuarakan pendapat. Sehingga, permasalahan komunal dapat dihadapi secara bersama dengan mencari solusi dari berbagai kearifan lokal yang ada melalui sebuah ruang publik. Berjalannya ruang publik serta partisipasi publik dalam setiap keputusan atau perumusan kebijakan negara,

merupakan salah satu contoh cita-cita demokrasi terlebih pasca reformasi. Diperlukan sebuah tempat bagi warga negara agar bisa dengan leluasa mempraktekkan cita-cita demokrasi, yaitu ruang publik itu sendiri. (Triguswinri, 2023)

Dalam karyanya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1989), Jürgen Habermas mengemukakan sebuah gagasan penting tentang ruang publik sebagai arena diskursus rasional yang bebas dari dominasi eksternal, seperti kekuasaan politik atau ekonomi. Habermas menjelaskan bahwa ruang publik ideal adalah tempat di mana individu-individu bebas berbicara dan berdiskusi tanpa pengaruh atau tekanan dari kekuatan luar. Di sini, warga negara bisa menyuarakan opini mereka mengenai masalah sosial dan politik, yang kemudian berkontribusi pada pembentukan opini publik yang rasional dan berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam kerangka ini, ruang publik menjadi ruang untuk perdebatan yang terbuka, memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan melalui komunikasi yang bebas dan rasional.

Pada titik semacam ini, kekhawatiran Jürgen Habermas menemukan koordinatnya. Habermas memperhatikan ruang publik yang hilang, di mana masyarakat bisa bertukar informasi, menginteraksikan ide dan opininya dengan santai dan tanpa tendensi politis tertentu. Kalau Habermas melihat salon-salon di Perancis dan kedai kopi di Inggris sebagai ruang publik yang hilang, Indonesia punya banyak warung kopi, ruang terbuka, taman kota, atau bahkan ruang-ruang digital seperti forum diskusi di media sosial yang bisa menjadi tawaran ruang publik yang terbuka dan egaliter. (Azwar, 2022)

Ruang diskusi merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita Habermas tentang ruang publik, yaitu sekelompok masyarakat yang berkumpul untuk membicarakan atau berdiskusi terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Dalam pandangan Habermas, ruang publik dan ruang diskusi memiliki peran penting dalam membangun masyarakat sipil yang sehat. Ruang publik memungkinkan semua individu berpartisipasi dalam percakapan sosial yang inklusif, sedangkan ruang diskusi memberikan struktur untuk membahas isu-isu penting secara mendalam. Keduanya mendukung proses demokrasi dan emansipasi individu dari penindasan sosial dan politik. (Azwar, 2022)

Seperti kegiatan diskusi mahasiswa seringkali dianggap sebagai wujud praktik ruang publik yang ideal, di mana mahasiswa dapat bertukar gagasan secara bebas dan rasional. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya degradasi kualitas diskusi yang terjadi dalam banyak lingkungan kampus saat ini. Diskusi yang semula bersifat terbuka dan kritis kian bergeser menjadi forum yang dipenuhi oleh komunikasi yang kurang mendalam, dan terfragmentasi akibat dominasi kelompok tertentu atau tekanan sosial (Rahman, 2021). Hal ini bertentangan dengan konsep ruang publik menurut Habermas yang menekankan pentingnya diskursus rasional, inklusif, dan bebas dari dominasi sebagai syarat terbentuknya opini publik yang kritis dan demokratis.

Seiring perkembangan zaman, Habermas mencatat terjadinya transformasi sekaligus kemunduran ruang publik. Proses komersialisasi media, dominasi kapitalisme, dan intervensi negara menyebabkan ruang publik kehilangan fungsinya sebagai wadah diskursus rasional. Opini publik tidak lagi terbentuk

melalui debat argumentatif, melainkan melalui manipulasi simbolik oleh media dan kepentingan pasar. Akibatnya, masyarakat kehilangan kendali atas wacana publik dan ruang-ruang diskusi bergeser menjadi ruang konsumsi (Triguswinri, 2023).

Namun, gagasan Habermas tidak lepas dari kritik. Jacques Derrida, dalam tradisi dekonstruksi, menyoroti bahwa konsep ruang publik Habermas mengabaikan kompleksitas bahasa dan ketidakstabilan makna. Derrida berpendapat bahwa komunikasi tidak pernah sepenuhnya transparan dan bebas dari ambiguitas. Menurutnya, klaim Habermas tentang rasionalitas komunikatif yang universal dan bebas dari dominasi adalah utopis, karena selalu ada elemen-elemen yang tersembunyi, tidak terungkap, dan tidak dapat dijangkau oleh diskursus rasional dan menegaskan bahwa komunikasi publik selalu dipengaruhi oleh konteks budaya dan kekuasaan yang membuat diskursus rasional menjadi problematik dan tidak netral (Prasetyo, 2021)

Meskipun kritik Derrida terhadap kompleksitas bahasa dan ketidakstabilan makna patut diperhatikan, konsep ruang publik Habermas tetap memiliki kekuatan penting sebagai ideal normatif yang menjadi acuan bagi praktik demokrasi deliberatif. Habermas menegaskan bahwa rasionalitas komunikatif bukanlah klaim sempurna, melainkan sebuah *proyek regulatif* yang memandu interaksi sosial agar dapat berlangsung secara terbuka, inklusif, dan bebas dari dominasi. Dalam konteks ini, ruang publik berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan warga masyarakat untuk berpartisipasi secara kritis dan rasional, serta menguji kekuasaan dan kebijakan publik melalui diskursus yang demokratis (Habermas, 1989). Selain itu, memperlihatkan meskipun ruang publik sering diwarnai konflik dan

ketegangan, prinsip-prinsip deliberasi Habermas tetap relevan sebagai sarana untuk mencapai konsensus yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, meski ruang publik tidak pernah sepenuhnya ideal, kerangka Habermas menyediakan visi penting untuk memperbaiki kualitas komunikasi dan partisipasi politik dalam masyarakat modern (Putra dan Sari, 2022)

Di Kota Tasikmalaya, Asosiasi atau komunitas yang mendukung interaksi sosial dan wacana publik begitu terbatas, sehingga akses masyarakat umum menjadi terbatas. Akibatnya, ruang publik sebagai arena komunikasi warga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan adanya krisis ruang publik di Kota Tasikmalaya. Komunitas memiliki peluang untuk menjadi sebuah wadah mewujudkan cita-cita demokrasi melalui ruang publik.

Kemunculan komunitas-komunitas di Kota Tasikmalaya mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik sebagai sarana interaksi sosial dan diskursus. Namun kenyataannya, banyak komunitas yang tidak memiliki akses terhadap ruang publik yang memadai dan berkelanjutan, sehingga mereka harus memanfaatkan ruang informal atau platform digital sebagai alternatif. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun komunitas tumbuh secara kuantitatif, secara kualitatif mereka belum sepenuhnya menjalankan fungsi ruang publik sebagaimana dimaknai oleh Habermas yakni sebagai arena diskursus rasional dan partisipatif yang bebas dari dominasi kekuasaan.

Dalam hal ini, salah satu komunitas yang bertempat di Kota Tasikmalaya adalah Galeri Jalanan, yang hadir sebagai bentuk pemanfaatan ruang publik yang terbatas ini. Galeri Jalanan merupakan sebuah komunitas yang dibentuk atas dasar

kesadaran membuat ruang literasi dan diskusi terbuka di Kota Tasikmalaya. Suasana diskusi mendorong siapapun dari berbagai latar belakang untuk mengikuti forum diskusi tanpa terbentur oleh tembok batasan yang diberikan oleh forum diskusi konvensional seperti di universitas, seminar, maupun di ruang kelas. Dengan meniadakan hirarki narasumber dan audiens, dapat mendorong orang-orang yang datang untuk terbuka dan tidak monoton. Galeri Jalanan memperlihatkan bahwa diskursus publik tidak harus selalu bersifat institusional atau formal. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, mereka menghadirkan ruang yang memungkinkan masyarakat untuk bersuara, berbagi perspektif, dan membangun kesadaran sosial secara kolektif.

Beberapa aktivitas yang digelar oleh Galeri Jalanan seperti di kedai kopi Loger yang berada di Kota Tasikmalaya, mengangkat tema refleksi september hitam dengan nonton bareng film *“Revolution Of Our Times”* pada bulan September 2024, sebuah dokumenter penting yang merekam perjuangan pro-demokrasi di Hong Kong. Pemutaran film ini bukan hanya sekadar hiburan, melainkan sebagai medium edukasi politik dan sosial bagi anggota komunitas serta masyarakat luas.

Melalui nobar film ini, Galeri Jalanan berupaya membuka ruang diskusi kritis tentang tema-tema kebebasan sipil, perlawanan terhadap pengekangan kekuasaan, dan pentingnya partisipasi warga dalam demokrasi. Film tersebut menginspirasi peserta untuk melihat bagaimana sebuah komunitas atau kelompok masyarakat dapat bersuara dan berjuang dalam menghadapi tantangan politik yang kompleks.

Lalu di bulan November 2024 mengadakan forum diskusi yang bertema “*Struggling From Modern Colonization*” di Pustaka Kopi Kota Tasikmalaya, dan menyikapi RUU TNI 2025 pada bulan Maret melakukan aktivitas simbolik di kedai kopi siloka dan diskusi serta aksi solidaritas yang dilakukan di alun-alun kota tasikmalaya dengan bagi-bagi takjil. Diskusi ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritisi dan memahami implikasi RUU tersebut terhadap demokrasi dan kontrol sipil atas militer.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Muhammad Imron Rifai selaku salah satu dari komunitas Galeri Jalanan menyebutkan bahwa forum diskusi yang diselenggarakan oleh Galeri Jalanan bertujuan menyebarkan pengetahuan melalui literasi jalanan. Dengan slogan “Mari membaca, entah itu kata atau lingkungan kita” secara filosofis, slogan ini mencerminkan untuk aktif memahami dunia baik melalui kata-kata yang dibaca maupun melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Dalam ruang publik, berarti mampu mengintegrasikan pengetahuan, informasi, dan kesadaran sosial untuk berpartisipasi dan berpartisipasi secara konstruktif.

Dalam merawat demokrasi, Galeri Jalanan berfungsi sebagai tempat interaksi sosial yang semakin terbuka, memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam perdebatan sosial dan politik. Galeri jalanan di Kota Tasikmalaya dapat menjadi contoh nyata yang menyediakan platform bagi masyarakat untuk berbicara mengenai isu-isu yang mereka anggap penting. Ini menunjukkan bahwa galeri jalanan, meskipun informal, dapat berfungsi sebagai arena bagi pertukaran ide yang memperkaya diskursus publik.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara idealisasi ruang publik menurut Habermas dengan realitas ruang yang diakses oleh komunitas di kota Tasikmalaya. Minimnya kajian yang mengkaji peran komunitas sebagai agen pembentuk ruang publik, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan keterbatasan ruang fisik untuk tetap menciptakan ruang diskursus, menjadi celah yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Dengan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk meneliti mengkaji pemikiran Jürgen Habermas mengenai konsep ruang publik dan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan pada komunitas galeri jalanan.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dibahas dalam latar belakang penelitian, bahwa seiring dengan perkembangan ruang publik, muncul berbagai bentuk ruang baru yang menawarkan kemungkinan interaksi sosial yang lebih inklusif, salah satunya adalah komunitas galeri jalanan. Maka diidentifikasi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah bagaimana aktivitas komunitas Galeri Jalanan dalam kerangka konsep ruang publik (*Public Sphere*)?

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan penulis untuk menghindari pengkajian yang terlalu luas serta tidak memungkinkan agar hasil dari penelitian bisa langsung berfokus pada jawaban dari sumber permasalahan dan pertanyaan, sehingga menghasilkan temuan yang lebih berarti dan dapat diterapkan. Dalam hal ini, penulis mengkonsentrasikan penelitian untuk mengetahui aktivitas komunitas

Galeri Jalanan tahun 2024-2025 dalam kerangka konsep ruang publik (*Public Sphere*)

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni, untuk mengetahui aktivitas komunitas Galeri Jalanan dalam kerangka konsep ruang publik (*Public Sphere*) sebagai ruang interaksi sosial dan diskursus yang inklusif dan demokratis.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan bisa bermanfaat, baik secara teoretis maupun praktis, bahkan akademis. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis baik secara teoretis maupun praktis adalah :

1.5.1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai peran Asosiasi serta komunitas sebagai ruang publik serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

1.5.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi pola dan instrumen yang efektif bagi pengelola ruang publik, masyarakat serta komunitas dalam hal ini sebagai ruang interaksi sosial dan diskursus yang lebih terbuka dan demokratis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada kajian ilmiah, tetapi juga pada praktik pengelolaan ruang publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam diskursus sosial dan politik.